

KOMUNIKASI POLITIK PARTAI POLITIK DALAM PEMILU: STUDI KASUS STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLKAR

Farida Laela, Riaty Raffiudin

Universitas Indonesia

Email: momyfarida03@gmail.com, riaty6594@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penentuan narasumber secara purposive sampling yang bertujuan memperoleh informasi secara spesifik dan akurat langsung dari sumbernya. Hasil, Disamping itu fungsi ideologis partai serta kontestasi dalam pemilu yang dilatarbelakangi oleh karakteristik yang dimiliki oleh calon legislatif atau kandidat dalam memainkan peran mereka semakin menambah variasi dalam kompetisi pemilu. Kesimpulan, pertama, mengenai positioning partai Golkar dalam proses pengambilan kebijakan dan konstelasi politik di Kabupaten Bogor. Ada empat faktor yang menentukan positioning partai Golkar di Kabupaten Bogor kaitannya dengan proses komunikasi politik yang mereka jalankan diantaranya adalah: pertama, figur yang berproses di partai Golkar sehingga mereka menjadi figur yang populis.

Kata Kunci: Komunikasi; Pemilu; Partai Politik.

Abstract

This study aims to examine the political communication strategy carried out by the Golkar party in increasing votes in the 2019 legislative election in Bogor Regency. This research uses qualitative methods by determining resource persons by purposive sampling which aims to obtain specific and accurate information directly from the source. In addition, the ideological function of parties and contestation in elections motivated by the characteristics possessed by legislative candidates or candidates in playing their role increasingly adds variety to the electoral competition. The conclusion, first, is regarding the positioning of the Golkar party in the policy-making process and political constellation in Bogor Regency. There are four factors that determine the positioning of the Golkar party in Bogor Regency in relation to the political communication process they run, including: first, figures who process in the Golkar party so that they become populist figures.

Keywords: Communication; Election; Political party

How to cite:	Farida Laela (2023) Komunikasi Politik Partai Politik dalam Pemilu: Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Daerah (Dpd) Partai Golkar, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Pendahuluan

Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal (Aprianti, 2017). Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih. Frase dua orang atau lebih ini biasa disebut dengan istilah komunikasi intrapersonal, yakni komunikasi dengan dua orang atau lebih. Komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial. Apabila orang telah mengadakan hubungan tetap, maka sistem komunikasi yang mereka lakukan akan menentukan apakah sistem tersebut dapat mempererat atau mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan ataupun menghilangkan perselisihan.

Unsur-unsur yang diperlukan dalam berkomunikasi antara lain sumber (pembicaraan), pesan (message), saluran (channel, media) dan penerima (receiver, audience). Dalam proses komunikasi diusahakan melalui penyampaian dan tukar menukar pendapat, informasi ataupun adanya perubahan sikap (Firmanzah, 2010).

Alasan mendasar untuk berbagai macam komunikasi, apakah dalam bentuk syarat-syarat yang mengirimkan impuls (dorongan) sebagai bentuk respon terhadap individu akan menimbulkan aksi timbal balik untuk membalas salah satunya melalui komunikasi (Oktavia, 2021). menjadi basis dan target sasaran komunikasi politik partai Golkar. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam upaya peningkatan perolehan suara partai dalam pemilu.

Golongan Karya (Golkar) lahir dari gerakan kolektivisme dalam konstelasi politik di Indonesia pada tahun 1957 dimana gagasan untuk memasukkan Golkar dalam perpolitikan di Indonesia ini teretus dari gagasan Soekarno yang pada saat itu merupakan politisi sekaligus pemikir dan aktor politik. Dalam perkembangannya, Golkar mengalami restrukturisasi dari kepemimpinan lama dan digantikan oleh kepemimpinan Orde Baru yang mengambil alih Golkar dan menjadikannya sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan politiknya dalam memenangkan pemilu di Indonesia.

Golkar merupakan partai yang telah berdiri sejak zaman Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaruan politik di Indonesia. Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 % suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7 % diperoleh NU, sedang PNI hanya mendapatkan 6,9 % dan Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4% (Suryadinata, 1992).

Di masa Orde Baru, ada tiga pilar kekuatan pemerintah, dikenal dengan jalur ABG, yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Birokrasi, dan. Golongan Karya. Anggota ABRI, walau tidak ikut memilih dalam pemilu, adalah kekuatan utama Golkar. Seluruh anggota Korpri atau pegawai negeri, otomatis menjadi anggota Golkar. Jalur "G" terdiri atas tiga kelompok induk organisasi, yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Dalam perjalanan politik di Indonesia, keberadaan Golkar memiliki akar sejarah yang panjang dalam perpolitikan Indonesia. Semangat awal pembentukan Golkar

dilatarbelakangi upaya untuk membendung pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mempertahankan ideologi negara Pancasila (Tanjung, 2007). Dengan semangat dan tujuan yang sama, membendung pengaruh PKI, berbagai eksponen anti-komunis berhimpun dalam wadah Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Golkar diberikan keistimewaan untuk menduduki berbagai peran strategis dan penting sebagai partai pemerintah. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan konsolidasi politik Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan pembangunan Orde Baru.

Persoalan legitimasi dan eksistensi partai menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan partai Golkar di Indonesia. Sejak awal berdirinya sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari para golongan fungsional, Golkar tidak mendeklarasikan diri secara eksplisit sebagai sebuah partai melainkan sebagai sebuah organisasi fungsional. Meskipun dalam perkembangannya ia tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik penopang rezim Orde Baru yang menjadi mesin politik penguasa dalam menggalang massa dan melanggengkan kekuasaannya.

Konstelasi dan dinamika politik yang terjadi di Indonesia turut serta membawa Golkar pada masa-masa keemasan hingga masa-masa sulit. Terbiasa dengan keistimewaan dan kemewahan politik di era Orde Baru Pamungkas (2011), Golkar mengalami fase survival dimana ia berupaya untuk terus mempertahankan eksistensinya, terutama sejak era reformasi bergulir dimana salah satu tuntutan adalah pembubaran/pembekuan Golkar yang dianggap sebagai penopang utama Orde Baru.

Segala hal yang identik dan menjadi unsur-unsur Orde Baru menjadi sebuah tekanan dan tuntutan bagi publik untuk dihapus dari sistem pemerintahan pasca reformasi.

Masa-masa sulit yang dialami Golkar tidak lepas dari tuntutan masyarakat dan tokoh reformasi yang berupaya menghindarkan pemerintahan dari campur tangan Golkar dan segala hal yang identik dengan Golkar. Faktor-faktor penyebab partai Golkar mengalami fase sulit diantaranya : pertama, tingginya sentimen anti golkar. Dalam pemilu 1999, kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Golkar sepi peminat karena banyaknya ancaman dan intimidasi dari masyarakat lain yang anti Golkar. Kedua, Golkar mendapat tekanan publik untuk dibubarkan atau dibekukan.

Ketiga, selain tekanan politik, Golkar juga terancam dibekukan karena maklumat Presiden Abdurrahman Wahid (pada 23 Juli 2001) yang salah satu isinya adalah memerintahkan Golkar untuk dibekukan. Keempat, Golkar diputus aksesnya dari jalur-jalur penopang dan pendukung orde baru yaitu militer dan birokrasi. Kelima, terjadi perpecahan di tubuh Golkar terutama dari ormas pendukungnya. Perpecahan ini akhirnya memunculkan partai-partai baru yang kemudian menjadi rival politiknya dalam pemilu 1999 seperti PKP, PMKGR, PKB, dan Partai Patriot.

Akibatnya pada pemilu 1999, suara Golkar turun drastis menjadi 22 persen. Bahkan pada 2009 turun sebesar 14 persen setelah sebelumnya di pemilu 2004 sempat naik menjadi 24 persen. Persoalan-persoalan yang dialami oleh partai Golkar menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan partai Golkar dalam mewarnai konstelasi politik di

Indonesia hingga mengantarkannya pada eksistensinya saat ini dalam sistem kepartaian di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bogor. Diawali dengan pola komunikasi yang dilakukan terhadap anggota dan kader partai serta kepada konstituen.

Penelitian ini berargumen bahwa dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bogor, Golkar mampu membuktikan eksistensinya dalam mempertahankan raihan suara partai untuk berada dalam urutan tiga besar peraih suara tertinggi yaitu dengan meraih perolehan suara ketiga terbesar (11,2%) dan berhasil menempatkan anggotanya di legislatif sebanyak 6 kursi di DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024. Hal ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan partai Golkar dalam meraih simpati masyarakat pemilih di Kabupaten Bogor untuk memberikan dukungan suaranya kepada partai Golkar.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi komunikasi politik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bogor?”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penentuan narasumber secara purposive sampling yang bertujuan memperoleh informasi secara spesifik dan akurat langsung dari sumbernya. Berdasarkan data awal dari data sekunder dan permasalahan penelitian ini, maka lokasi penelitian secara purposif ditentukan di tiga lokasi yaitu: pertama, Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bogor di Jl. Raya Jakarta – Bogor No.46 Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 16915 sebagai lokasi sekretariat pengurus Partai Golkar sebagai sumber sata primer dalam penelitian ini; kedua, Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jl. Raya Tegar Beriman No. 35 Tengah Cibinong, Kabupaten Bogor 16914;

ketiga, Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor di Jl.Raya Pondok Rajeg No.17 Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor 16914; keempat, Kantor Sekretariat Lembaga Riset Visi Nusantara Maju di Perum Bumi Cibinong Endah (CBE) Blok D8 No.11 Cibinong, kabupaten Bogor 16913; kelima, Kampus Institut Teknologi Bisnis (ITB) Visi Nusantara Bogor di Jl. Cipayung Barat RT 03/RW 15, Cibinong Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16914.; keenam, Kantor Sekretariat DEEP Indonesia Bogor Raya di Perum Bumi Cibonong Endah Blok D8 No.11 Cibinong, Kabupaten Bogor 16913.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif (Qualitative research) menurut Creswell (2017), hal 15) adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena mampu mengeksplorasi secara mendalam dan detail terhadap sebuah

fenomena tertentu, khususnya dalam hal ini penjelasan mengenai proses dan strategi komunikasi politik.

Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus (case study) sebagaimana yang dijelaskan oleh Fitrah (2018) bahwa pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif bertujuan mendalami informasi yang mendasarkan pada keterangan narasumber ataupun situasi yang melatarbelakanginya.

Penelitian studi kasus menelaah kasus tertentu dalam konteks kehidupan kontemporer yang menggunakan berbagai sumber informasi diantaranya wawancara, berbagai laporan dan dokumen (Mutiani et al., 2019). (Juditha, 2020) dalam Creswell menjelaskan bahwa kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menyelidiki strategi komunikasi politik partai politik Golkar di Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif 2019, dimana dalam periode waktu tersebut DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor berada dibawah kepemimpinan Ade Ruhandi (atau yang lebih akrab disapa jaro Ade) yang menjabat sebagai ketua selama dua periode berturut-turut.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (depth interview) kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Narasumber dipilih dengan sengaja dan penuh perencanaan (purposefull select) (Ariesta, 2013). Di bawah ini akan ditampilkan terkait matriks informan dan identitas yang diperoleh.

Menurut Rahayu (2022), langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi. Subadi (2006) berargumen bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun proses kerja penelitian ini dengan melakukan teknik pengumpulan data sebagaimana nyatakan Febriana (2021): (a) Wawancara, (b) Dokumen-dokumen, (c) Materi audio dan visual.

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Wijaya, 2020). Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah “Model Miles and Huberman” bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Hasil dan Pembahasan

Partai Golkar as a Clientalistic Party

Sebagaimana konsep tipologi partai politik yang dikemukakan oleh Azwar (2009) yang memfokuskan pada tipe dan karakteristik partai sebagai landasan bagi partai dalam menjalankan partai sesuai dengan karakteristik dan orientasi kepartaian yang mereka anut. Disamping itu fungsi ideologis partai serta kontestasi dalam pemilu yang dilatarbelakangi oleh karakteristik yang dimiliki oleh calon legislatif atau kandidat dalam memainkan peran mereka semakin menambah variasi dalam kompetisi pemilu (Rahmatunnisa, 2017).

Golkar sebagai partai yang bertipe klientalis memiliki rekam jejak cukup lama dan mengakar. Sejak awal dibentuk sebagai sebuah organisasi pada masa Orde Lama, Orde Baru dan bermetamorfosa menjadi partai politik di era reformasi, hingga akhirnya partai Golkar berhasil membuktikan dan mempertahankan eksistensinya hingga saat ini dengan mengikuti berbagai kontestasi pemilu dan masuk kedalam jajaran top five raihan perolehan suara partai politik peserta pemilu.

Sebagai partai yang identik dengan tipe klientalistiknya, partai Golkar tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan dan perkembangan politik di tanah air. Dalam hal patronase politik, partai Golkar bahkan menjadi “role model” bagi partai-partai lain dalam menjalankan kiprah politiknya.

Kekuatan Partai Golkar di Kabupaten Bogor

Posisi dan kedudukan Golkar sebagai salah satu partai dengan raihan suara top three di Kabupaten Bogor cukup diperhitungkan baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Hal ini ditunjukkan dengan peran dan kontribusi Partai Golkar dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur pemukiman, jalan dan ruang terbuka hijau sebagai area publik menjadi pembuktian bagi positioning Partai Golkar dalam proses pengambilan kebijakan dan pemerintahan di Kabupaten Bogor.

Positioning Partai Golkar di tingkat lokal tidak terlepas dari positioningnya dalam skala nasional. Positioning Golkar dalam konstelasi politik nasional khususnya di legislatif, masih menjadi lembaga atau partai yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Artinya ketika saat ini rezim PDIP yang sedang berkuasa akan mengambil sebuah kebijakan, maka Golkar menjadi salah satu kekuatan penyeimbang bagi proses dan dinamika politik yang akan terjadi selama dan setelah pengambilan kebijakan tersebut. Golkar dengan figur-figur kuat dan kharismaniknya menjadi kekuatan tersendiri yang diperhitungkan oleh lawan politik maupun partai-partai lainnya.

Golkar memiliki positioning yang kuat di mata partai-partai lainnya. Sehingga partai Golkar hingga hari ini masih menjadi partai yang bertahan dan eksis dengan segala dinamikanya serta menjadi salah satu partai yang tidak akan ditinggal dalam proses konstruksi pembangunan negara. Partai Golkar di Kabupaten Bogor, memiliki positioning cukup kuat terutama di ranah legislatif. Hal ini mengingat Golkar memiliki fraksi di DPRD Kabupaten Bogor sebagai alat kepanjangan tangan partai yang berperan aktif dalam mengawal setiap kebijakan-kebijakan yang diambil melalui DPRD, khususnya kebijakan anggaran pembangunan infrastruktur pemukiman, jalan dan ruang terbuka hijau dalam konteks pemerintahan di Kabupaten Bogor.

Partai Golkar melalui wakilnya di legislatif juga terbuka terhadap setiap masukan dan saran terkait proses kebijakan dan pembangunan yang berimpikasi terhadap kepentingan masyarakat di Kabupaten Bogor seperti kebijakan pembangunan jalan, pembangunan sarana dan prasarana, gedung sekolah, irigasi, dan kebijakan ekonomi masyarakat lainnya.

Pola Komunikasi Politik Partai Golkar di Kabupaten Bogor

Partai Golkar menerapkan pola komunikasi yang berpola kombinasi top down dan bottom up. Dalam pelaksanaannya Partai Golkar menerapkan pola komunikasi politik dari elit partai kepada massa (top down) dan dari massa kepada elit (bottom up) yang menjadi formulasi dalam merumuskan strategi komunikasi politik partai. proses komunikasi yang diterapkan oleh Partai Golkar ini menjadi bagian dari komunikasi politik partai dan dijadikan sebagai sarana interaktif antara partai dengan kader, simpatisan dan konstituen partai, juga sebaliknya. Sebagaimana konsep pola komunikasi politik yang dikemukakan oleh (Mufidah, 2017);(Zamroni, 2016).

Dalam menerapkan pola komunikasi top down dan bottom up sebagai bagian dari proses komunikasi politik yang diterapkan Partai Golkar sebagai sarana interaksi antara partai dengan kader, anggota, simpatisan dan konstituen partai. Metode yang digunakan dalam menerapkan komunikasi politik yaitu dari elit partai kepada massa (top down) dan dari massa kepada elit (bottom up) yang di formulasikan dalam sebuah strategi komunikasi yang mereka gunakan (Kodiyat & Andryan, 2021).

Komunikasi partai politik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu top down dan bottom up baik kepada anggota/kadernya maupun kepada masyarakat. konsep ini digunakan oleh partai Golkar dalam menjalankan komunikasi politiknya kepada masyarakat.

Komunikasi politik yang dilakukan oleh partai merupakan bagian dari sebuah strategi komunikasi politik dan merupakan sebuah relasi yang erat kaitannya antara politik, media dan bagian dalam proses demokrasi McNair (2017) dan sebagai proses berkomunikasi dan interaksi antar individu yang terlibat di dalamnya. Dalam pengertian yang lebih luas, komunikasi politik menggabungkan antara penerapan komunikasi sebagai bagian dari strategi yang dilakukan oleh organisasi politik seperti salah satunya partai politik (McNair, 2017).

Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa Partai Golkar memiliki, merumuskan dan menerapkan strategi komunikasi politik untuk penguatan sistem dan pranata kelembagaan partainya. Bentuk strategi komunikasi politik yang dilakukan antara lain ; pertama, mengefektifkan konsolidasi struktural partai, struktural sistem baik di tingkat kepengurusan maupun sampai ke tingkat kader.

Kedua, membuat program bagi para fungsionaris partai yang disebut Dikpol (baca:pendidikan politik) yang diperuntukkan bagi para fungsionaris sebagai wadah

pembekalan bagi mereka dalam menjalankan tugas yang berbasis kewilayahan untuk menyosialisasikan visi misi partai Golkar. Ketiga, memaintain tata kelola dan peran kepartaian dalam berbagai momentum politik. Keempat, menyusun desain program partai sebagai investasi politik jangka panjang. Kelima, membuat metode analisis melalui instrumen survei untuk mengetahui preferensi politik masyarakat untuk kemudian melakukan pendalaman pembacaan terhadap target dan segmentasi politik partai. Keenam, melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui simpul-simpul dan basis sosial kemasyarakatan.

Strategi komunikasi politik yang dibangun oleh sebuah partai menjadi ciri khas dan mewakili karakteristik partai tersebut baik secara ideologi maupun secara tipologi partai, sehingga strategi yang dirumuskan berdasarkan tipologi partai. Proses strategi komunikasi politik dilakukan oleh institusi politik kepada masyarakat untuk mentransformasikan nilai dan informasi dari para politisi melalui media ataupun lainnya kepada publik (Heryanto, 2018).

Proses tersebut berlangsung secara horizontal antar aktor politik dan berjalan secara kesinambungan secara vertikal dari opini publik yang berkembang kepada otoritas yang berwenang. Komunikasi politik juga menjadi pusat perhatian dalam sebuah pemilihan dan proses pembuatan kebijakan di internal partai sebagai suatu proses yang fundamental (Alamsyah & Misnan, 2021). Strategi komunikasi politik yang dibangun oleh sebuah partai menjadi ciri khas dan mewakili karakteristik partai tersebut baik secara ideologi maupun secara tipologi partai, sehingga strategi yang dirumuskan berdasarkan tipologi partai.

Terdapat lima unsur strategi komunikasi politik dilakukan oleh partai Golkar, seperti yang dikemukakan oleh Kivunja (2015); Pertama, visi organisasi atau perspektif harus dimiliki dan dijadikan acuan dalam mengatur lebih lanjut aktivitas komunikasi. Kedua, menetapkan serangkaian rencana yang diturunkan dari visi dan misi, perencanaan yang tepat juga berangkat dari serangkaian data dan informasi yang ditempatkan di lapangan (fact finding). Ketiga, menetapkan taktik yaitu langkah-langkah praktis yang harus ditempuh, dengan sudah mempertimbangkan kemampuan internal serta situasi atau keadaan lapangan.

Keempat, meletakkan posisi atau kedudukan organisasi maupun program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi, termasuk menempatkan berbagai komponen komunikasi seperti komunikator, sumber, pesan serta target sasaran; Kelima adalah menyusun pola aktivitas komunikasi, sehingga strategi menjadi jelas dan dapat diikuti atau dijalankan oleh semua pelaku komunikasi.

Dengan demikian, Partai Golkar di Kabupaten menjalankan strategi komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Thompson tersebut guna meraih dukungan dari masyarakat pemilih. Dengan langkah-langkah yang menjadi bagian dari strategi komunikasi politik tersebut juga menjadi acuan bagi DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor dalam mendistribusikan job description kepada seluruh kader dan fungsionaris yang telah di prospek untuk menjadi anggota legislatif agar lebih proaktif menjalankan unsur-unsur strategi komunikasi politik tersebut.

Pada dasarnya komunikasi politik merupakan perubahan gagasan dan opini yang dikembangkan untuk menjalin interaksi antara masyarakat, institusi politik, dan entitas masyarakat lainnya seperti media yang berlangsung baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan dan target yang sudah dirancang sebelumnya (Nair, 2018). Sejalan dengan konsep dari Mc.Nair (2018), partai Golkar melakukan berbagai strategi komunikasi politik dengan menyusun agenda sosialisasi dan komunikasi politik kepada masyarakat pemilih dalam rangka pemilu 2019.

Media Komunikasi Politik Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bogor

Dalam hal kampanye dan propaganda media, Partai Golkar memiliki beberapa bentuk dan media untuk mengampanyekan program maupun visi dan misi partai kepada masyarakat. Kampanye tersebut dapat dilakukan baik secara konvensional maupun digital sesuai dengan perkembangan media digital saat ini, partai Golkar juga adaptif terhadap perkembangan media digital dan sosial media yang menjadi elemen penting dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Bentuk kampanye yang dilakukan diantaranya; pertama, kampanye personal branding dengan menggunakan tokoh yang berpengaruh di masyarakat ataupun figur yang menjadi panutan di masyarakat. Kedua, mengangkat tema program kekarya sebagai selling point partai dimana Golkar menggunakan tagline “Golkar menang, rakyat sejahtera”. Ketiga, kampanye secara konvensional dengan mengadakan event-event di masyarakat sesuai dengan tema dan momentum di masyarakat, seperti bazaar, jalan sehat, gerak jalan, bakti sosial, penggalangan dana, beasiswa pendidikan, training bagi para milenial, pengajian, kerja bakti dan gotong royong bersama membersihkan tempat ibadah, atau fasilitas umum lainnya.

Keempat, sosialisasi secara konvensional melalui pemasangan baliho/spanduk di ruang-ruang publik. Kemudian secara digital partai Golkar juga secara khusus membentuk bagian yang membidangi hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat yang dinamakan Media Penggalangan Opini (MPO). MPO ini khusus ditempati oleh orang-orang atau kader-kader yang memiliki kapasitas tidak hanya dalam hal IT, namun juga enerjik, dinamis dan kreatif dalam mengangkat isu-isu strategis yang cukup menarik perhatian masyarakat dan kemudian mengemasnya menjadi sebuah konten digital yang berisi penyikapan partai terhadap isu yang terjadi, penyampaian program partai, sosialisasi visi misi partai dan kampanye-kampanye partai.

Pola komunikasi yang dikemukakan oleh Hogan dan Melville (2015) dimana pola komunikasi partai politik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu top down dan bottom up baik kepada anggota/kadernya maupun kepada masyarakat. konsep ini digunakan oleh partai Golkar dalam menjalankan komunikasi politiknya kepada masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti yang telah diuraikan dalam Bab I hingga Bab IV dapat diambil kesimpulan. pertama, mengenai positioning partai Golkar dalam proses

pengambilan kebijakan dan konstelasi politik di Kabupaten Bogor. Ada empat faktor yang menentukan positioning partai Golkar di Kabupaten Bogor kaitannya dengan proses komunikasi politik yang mereka jalankan diantaranya adalah: pertama, figur yang berproses di partai Golkar sehingga mereka menjadi figur yang populis.

Seperti contoh Jaro Ade sebagai figur Golkar yang populis di Kabupaten Bogor, karena ia memulai dan merintisnya dari bawah mulai dari anak ranting hingga ke tingkat DPD kabupaten. Kedua, komunikasi politik yang dijalankan partai Golkar di Kabupaten Bogor turut dipengaruhi oleh figur dan aktor internal partai. Ketiga, penataan media yang turut berpengaruh terhadap posisi mereka di pemerintahan. Keempat, labeling yang melekat pada Golkar sebagai partai “senior” di masyarakat yang sangat kuat dan melekat.

Kedua, mengenai tipe partai, dimana partai Golkar sebagai partai yang bertipe klientalis berdasarkan literatur yang dikemukakan oleh Kitschelt (1995) memiliki rekam jejak cukup lama dan mengakar. Sejak awal dibentuk sebagai sebuah organisasi pada masa Orde Lama, Orde Baru dan bermetamorfosa menjadi partai politik di era reformasi, hingga akhirnya partai Golkar berhasil membuktikan dan mempertahankan eksistensinya hingga saat ini dengan mengikuti berbagai pemilu dan masuk kedalam jajaran “top five” raihan perolehan suara partai politik peserta pemilu.

Ketiga, terkait dengan pola komunikasi politik yang dibangun dan dijalankan oleh partai Golkar cenderung mengarah pada “sustainable role” yang lebih menekankan pada keberlangsungan komunikasi politik partai dalam jangka panjang. Salah satu ciri partai Golkar diantaranya adalah; pertama, politisinya yang mapan dalam berpolitik, sebagai contoh yaitu kemapanan sikap politik mereka dalam menyikapi berbagai isu negatif dan serangan politik yang menerpa atau bahkan mendeskreditkan partai Golkar, mereka tetap tenang dan tidak serampangan menanggapi berbagai isu yang diarahkan dan dialamatkan kepada partai mereka. Kedua, partai ini dikenal dengan kemapanan dalam hal kaderisasinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kadernya yang berada di tiap perwakilan kecamatan, desa, bahkan dalam hierarkis terkecil dalam lingkup rt dan rw, mereka memiliki kader dan basis militan yang siap mendukung dan menjadi salah satu kekuatan partai.

Keempat, mengenai konsep strategi komunikasi politik partai, dalam hal ini strategi komunikasi politik yang dipetakan dan dirumuskan oleh partai Golkar dalam rangka pemilu yaitu terdiri dari : pertama, melakukan pranata kelembagaan untuk sukses konsolidasi di internal partai yang bertujuan untuk penguatan sistem struktural partai Golkar di Kabupaten Bogor.

Kedua, dengan adanya coatil effect dalam pemilu, sebagai contoh dampak pilpres terhadap perolehan suara partai, maka partai Golkar secara garis kebijakan partai berusaha melakukan manuver politik dengan berkoalisi dan menjadi salah satu partai pengusung pada pilpres 2019. Ketiga, menargetkan perolehan suara maksimal dalam pilkada di Kabupaten Bogor yang diyakini akan berdampak pada perolehan suara mereka pada pemilu legislatif.

Kelima, mengenai konsep media komunikasi politik yang digunakan partai, dalam hal ini partai Golkar yang memiliki divisi khusus menangani strategi komunikasi politik

terkait pemetaan target-target kemenangan pemilu yaitu “Badan Pemenangan Pemilu” yang bertugas memetakan strategi kemenangan pemilu melalui berbagai media, termasuk melalui media komunikasi digital dengan menyusun bagian yang dinamakan MPO “Media Penggalangan Opini”.

Bagian ini menangani dan mengurus secara khusus untuk sosialisasi di ruang-ruang publik untuk mengomunikasikan program partai kepada masyarakat, sarana komunikasi politik partai dengan masyarakat sekaligus media kampanye yang efektif dan masif dalam rangka upaya meraih dukungan dan preferensi masyarakat terhadap partai Golkar. Sebagai bahan sosialisasi dan media kampanye, partai Golkar di Kabupaten Bogor juga bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menggunakan metode analisis survey sebagai indikator umum untuk melihat dan mengukur situasi dan kondisi di tingkat pemilih di Kabupaten Bogor yang disesuaikan dengan konteks periodisasi zaman.

BIBLIOGRAPHY

- Alamsyah, A., & Misnan, M. (2021). Manajemen Komunikasi Politik Partai Golkar Pada Panggung Agregasi Kebijakan Omnibus Law. *KOMUNIKATA*57, 2(2), 89–100.
- Aprianti, A. (2017). Perilaku komunikasi Verbal dan Non Verbal Pecinta Kereta Api. *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, 3(1), 89–108.
- Ariesta, I. N. (2013). *Produksi Pesan Dan Pembentukan “Theater Of Mind” Dalam Fiksimini Di Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Persepsi Penulis Fiksimini dalam Memproduksi Pesan yang Membentuk “Theater of Mind” di Twitter)*.
- Azwar, R. C. (2009). *Politik komunikasi Partai Golkar di tiga era: dari partai hegemonik ke partai yang berorientasi" pasar"*. Grasindo.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Febriana, D. W. P. (2021). *Penerapan Pembelajaran Shalat Bagi Anak Tunagrahita Dengan Media Audio Visual (Studi Di Sma Luar Biasa Yayasan Pendidikan Luar Biasa Banjarmasin)*.
- Firmanzah, P. D. (2010). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik*. IRCiSoD.
- Juditha, C. (2020). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Pola Komunikasi Masyarakat Desa. *Jurnal PIKOM; Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 21(2), 131–144.

- Kivunja, C. (2015). Teaching students to learn and to work well with 21st century skills: Unpacking the career and life skills domain of the new learning paradigm. *International Journal of Higher Education*, 4(1), 1–11.
- Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 101–112.
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication* (Vol. 5). Taylor & Francis.
- Mufidah, A. L. (2017). *Strategi Komunikasi Politik Dan Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Dra. Dewanti Rumpoko, M. Si dan Ir. H. Punjul Santoso, MM pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu 2017)*. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.
- Mutiani, M., Subiyakto, B., Jumriani, J., Aslamiah, A., & Afrina, A. (2019). *Laporan Penelitian: Relevansi Modal Sosial Dalam Pembelajaran IPS (Studi Kasus Dalam Sistem Zonasi Di Smp Negeri Kota Banjarmasin)*.
- Nair, S. R. (2018). Analyzing the relationship between store attributes, satisfaction, patronage-intention and lifestyle in food and grocery store choice behavior. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 46(1), 70–89.
- Oktavia, R. (2021). *Pola Komunikasi Kelompok Dalam Menghadapi Penderita Penyakit Mental Dalam Film 'Lars And The Real Girl.'* Universitas Hasanuddin.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia, institute for Democracy ad welfarism*. Yogyakarta.
- Rahayu, H., Rudiantna, R. D., Darmana, F., Trihastuti, M., & Yuniarsih, Y. (2022). Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Melalui Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Information And Communication Technology (Ict) Di Kelas X Sma Darul Falah. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(9), 1287–1302.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
- Subadi, T. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Muhammadiyah University Press.
- Suryadinata, L. (1992). *Golkar dan militer: Studi tentang budaya politik*.
- Tanjung, A. (2007). *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Zamroni, M. (2016). Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus Partisipasi Selebritis Perempuan Dalam Komunikasi Politik Di Partai-Partai Islam Pada Pemilu 2014 Di Indonesia). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 9(1).

Copyright holder:

Farida Laela (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

